

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melakukan berbagai perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan administrasi negara dan sistem akuntansi secara keseluruhan. Di era reformasi ini, setiap negara termasuk Indonesia perlu memiliki kinerja pemerintahan yang baik atau dikenal dengan istilah *good corporate governance*. Pelaksanaan otonomi daerah ialah salah satu komponen dari upaya pemerintah pusat untuk mereformasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah pusat di berbagai bidang ditransformasikan ke dalam kebijakan daerah, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, melalui pelaksanaan otonomi daerah (Nurdiansah, 2022).

Perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang menggantikan UU No. 32 Tahun 2004, secara signifikan mempengaruhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintah daerah, termasuk peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai revisi dan penyempurnaan

peraturan pemerintah sebelumnya. Pengelolaan keuangan daerah mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah. Hal ini mencakup tanggung jawab keseluruhan atas penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Uga & Andrian, 2019).

Saat ini tuntutan masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang baik semakin meningkat. Peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas sangat penting untuk mengevaluasi seberapa baik pemerintah berfungsi, karena mencerminkan kinerjanya secara akurat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi (Rahman & Permatasari, 2021). Kualitas laporan keuangan tersebut harus mengikuti standar yang berlaku umum. Pemerintah dituntut oleh masyarakat agar menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi empat karakteristik pelaporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan berfungsi sebagai cara bagi masyarakat, yang telah menaruh kepercayaan pada pemerintah, untuk meminta pertanggungjawaban manajemen pemerintah atas kinerja keuangannya (Yeni et al., 2020). Pihak-pihak yang berkepentingan umumnya memanfaatkan informasi dalam laporan keuangan. Dimana para pemangku kepentingan tersebut

memanfaatkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Diharapkan keputusan yang diambil akan mengarahkan pemerintah ke arah yang lebih baik. Laporan keuangan yang berkualitas akan menunjukkan bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Jika laporan yang dihasilkan kurang bagus akan menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, yang menggantikan PP No. 24 Tahun 2005. Setiap tahun, Badan Pengawas Keuangan (BPK) memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penilaian yang diberikan terhadap suatu laporan keuangan merupakan cerminan dari kualitas manajemen dan penyajian laporan keuangan tersebut (Murapi, 2020). BPK menawarkan tiga jenis opini. Pertama adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menandakan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan SAP dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup, sehingga relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Kedua, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang menandakan bahwa laporan keuangan memenuhi kriteria pemeriksaan namun tidak memiliki bukti yang cukup, atau sebaliknya. Opini ketiga, Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), berarti laporan keuangan tidak sesuai dengan SAP dan tidak memiliki bukti yang kuat.

Selain itu, sistem akuntansi juga diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan. Untuk membuat laporan keuangan daerah, perlu adanya sistem akuntansi keuangan daerah. Susanto dan Halim (2018) mendefinisikan akuntansi keuangan daerah sebagai prosedur pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian kegiatan keuangan badan pemerintah daerah, yang dimanfaatkan sebagai data bagi entitas eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi yang berkaitan dengan pemerintah. Lebih lanjut, sistem akuntansi merupakan aspek mendasar dan penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Permendagri Nomor 77 tahun 2020 ialah proses pengumpulan data dari awal hingga pelaporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Kegagalan dalam memahami sistem akuntansi akan menghambat pembuatan laporan keuangan. Pemerintah telah berupaya menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan. Namun, tidak semua pegawai pemerintah benar-benar memahami sistem akuntansi keuangan daerah.

Faktanya, laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak yang tidak memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Banyak laporan keuangan yang masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian

(WDP) karena ketidakpatuhan terhadap standar dan kurangnya bukti-bukti transaksi, yang menyebabkan penyusunan laporan keuangan tidak lengkap. Selain itu, laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif dapat diidentifikasi ketika mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena opini ini hanya diberikan jika laporan keuangan dinilai telah menyajikan informasi keuangan yang akurat tanpa kesalahan yang signifikan.

Kabupaten Tegal yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ini beribukota di Slawi. Kota Tegal dan Laut Jawa berbatasan dengan Kabupaten Tegal bagian utara, Kabupaten Pemalang berbatasan dengan Kabupaten Tegal bagian timur, serta bagian barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas. Meskipun Pemerintah Kabupaten Tegal mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2022. Namun demikian, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal masih terdapat banyak kelemahan dan kekeliruan karena pengelolaan SAP yang belum tepat (IHPS I, 2023). Hal tersebut dikarenakan masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum sepenuhnya menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) untuk tahun anggaran 2023, seperti yang tergambar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2022, menunjukkan adanya peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penurunan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) jika

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan akuntabilitas pelaporan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Namun demikian, Badan Pemeriksa Keuangan masih menemukan beberapa kekurangan dalam mengawasi dan mengatur pencatatan akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Ketidapatuhan terhadap peraturan pemerintah dalam laporan keuangan akan menyebabkan kerugian daerah, kemungkinan kekurangan pendapatan, manajemen yang buruk, dan inefisiensi (IHPS I, 2023). Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022, berikut disajikan daftar pemerintah daerah yang mengalami penurunan opini BPK dalam tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Pemda yang Mengalami Penurunan Opini tahun 2022

No	Keterangan	Wilayah
1	WTP → WDP	1. Pemkab Padang Lawas 2. Pemkot Binjai 3. Pemkab Kerinci 4. Pemkab Ogan Ilir 5. Pemkab Pagar Alam 6. Pemkot Palembang 7. Pemkab Kaur 8. Pemkab Tanggamus 9. Pemkab Bekasi 10. Pemkab Pangandaran 11. Pemkot Bandung 12. Pemkab Pematang 13. Pemkab Sumbawa 14. Pemkab Kapuas 15. Pemkab Kolaka Timur 16. Pemkab Kepulauan Tanimbar 17. Pemprov Maluku Utara 18. Pemprov Papua
2	WDP → TMP	1. Pemkab Kepulauan Meranti

Sumber : IHPS I 2023

Evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2021 mengalami penurunan pada tahun 2022. LKPD yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) perlu meningkatkan pengendalian internalnya untuk menjamin keakuratan informasi laporan keuangan. Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dari BPK mengindikasikan bahwa akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan tidak memiliki bukti pendukung yang memadai. BPK menemukan beberapa permasalahan dalam LKPD tahun 2022, diantaranya permasalahan penyajian akun aset lancar, penyajian akun aset tetap, penyajian akun aset lainnya, penyajian akun belanja operasi, dan penyajian akun belanja modal.

Adapun hasil evaluasi yang menjadi ketertarikan penelitian dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) mengenai akun aset pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal pada tahun 2022, diantaranya yaitu koreksi atas dobel catat aset tanah sebesar Rp50.000.000,00, koreksi pencatatan Gedung bangunan RSUD dr Soeselo, koreksi kurang atas penyisihan Piutang pada Dinas Perhubungan, koreksi pencatatan Gedung yang masih bergabung pada Dinas Pendidikan serta koreksi yang menambah ekuitas karena pencatatan hibah aset.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan beberapa pemerintah daerah masih jauh dari standar

informasi yang diperlukan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk memperoleh gambaran lebih jauh tentang bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini akan memungkinkan peneliti untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam proses penelitian dan pada akhirnya memberikan dampak positif pada pembelajaran.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan di masa yang akan datang dalam membuat dan menyajikan laporan keuangan supaya lebih baik dan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam bidang ilmu pengetahuan dan menjadi referensi untuk upaya penelitian di masa depan.

1.5 Batasan Masalah

Tindakan menetapkan batasan pada suatu masalah dilakukan untuk mencegah topik menjadi terlalu luas, yang pada gilirannya memungkinkan diskusi yang lebih terfokus dan dapat dikelola. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa tujuan penelitian terpenuhi. Masalah-masalah yang diharapkan untuk dibatasi selama persiapan penelitian ini meliputi:

1. Populasi dan sampel yang akan diteliti adalah pegawai sub bagian keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tegal.
2. Penelitian ini terbatas hanya menggunakan variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel bebas (independen) serta kualitas laporan keuangan sebagai variabel terikat (dependen).
3. Penelitian ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1.6 Kerangka Berpikir

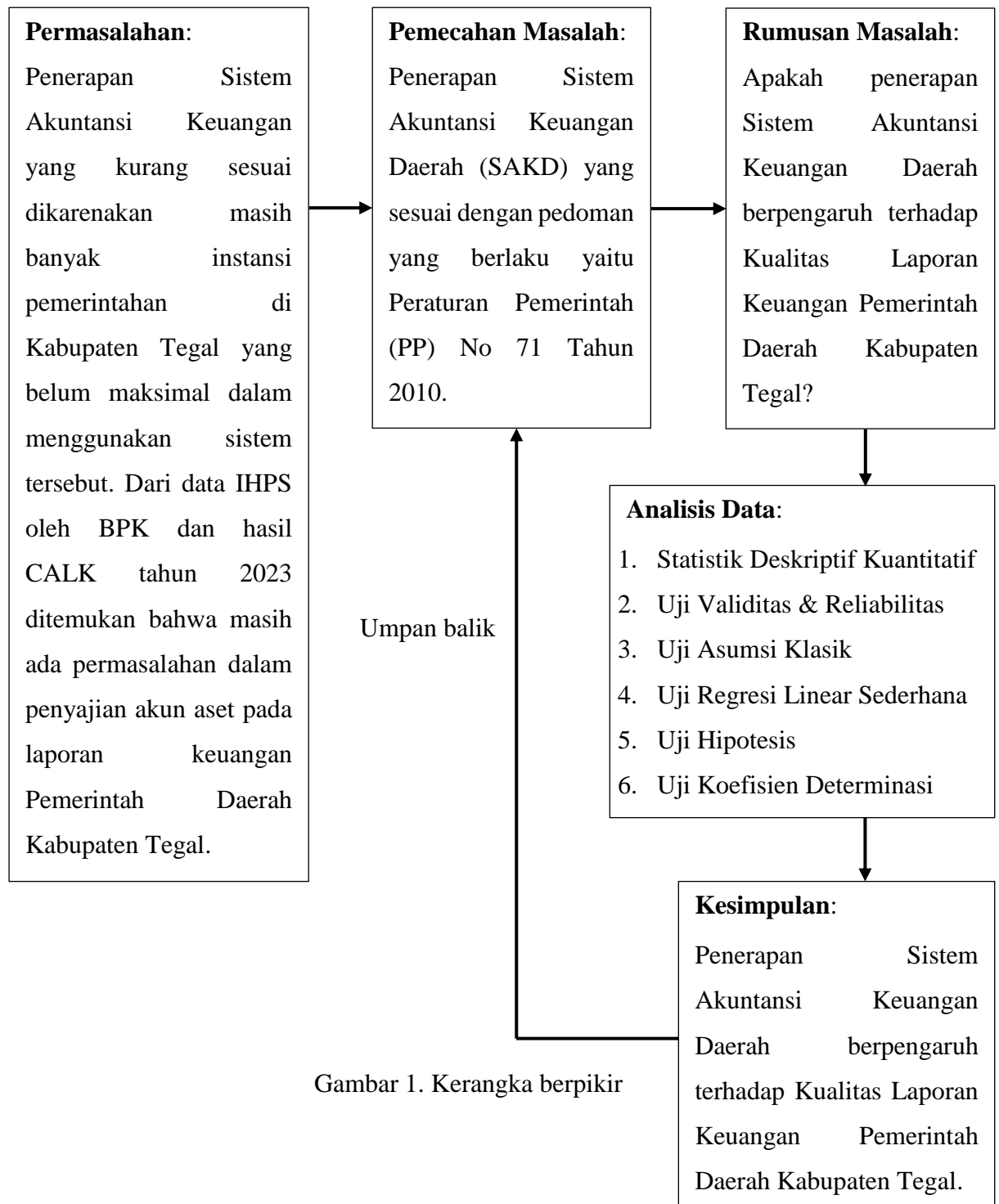
Kerangka berpikir merupakan gambaran tentang hubungan antara variabel yang diteliti, yang disusun dari berbagai teori yang telah didefinisikan. Kualitas laporan keuangan ialah salah satu hal yang sangat penting bagi suatu entitas atau perusahaan untuk melaporkan hasil keuangannya atau keberhasilannya dalam mengelola suatu perusahaan. Pemerintah daerah juga diharuskan membuat laporan keuangan berkualitas yang ditujukan untuk kepentingan umum/publik. Selain untuk kepentingan umum entitas juga membuat laporan keuangan untuk pemangku kepentingan yang membutuhkan. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat mempengaruhi pandangan publik kepada aparat negara yang sudah diamanahi oleh mereka. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dibutuhkan setidaknya empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami agar suatu laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas ialah sudah memenuhi keempat karakteristik tersebut.

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dihasilkan dari penggunaan atau penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah sistem akuntansi pemerintah daerah yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020. SAKD berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah untuk mengelola pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan

penyajian laporan keuangan daerah secara efektif. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan penentu utama keberhasilan suatu organisasi pemerintah. Tujuannya adalah agar pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah statistik deskriptif kuantitatif dengan metode analisis uji regresi linear sederhana, uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik sebagai teknik pengolahan data menggunakan program SPSS versi 22. Penelitian ini akan menganalisis kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dibutuhkan untuk implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, khususnya menekankan pada relevansi, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami serta memadai dan mengikuti pedoman Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti akan menyederhanakan dengan menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan dan daftar isi.

Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat dan efisien.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengertian konsep dan perilaku dasar yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu mengenai pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan definisi kualitas laporan keuangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan

data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi laporan penelitian yang sudah dilaksanakan serta pembahasan hasil penelitian tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang garis besar dan inti hasil penelitian, disertai saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi institusi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang digunakan dan berkaitan dengan penelitian.

3. Bagian akhir

Bagian akhir terdapat lampiran yang berisi informasi tambahan untuk mendukung kelengkapan laporan, antara lain : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data lain yang diperlukan.